

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 170

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.1

Amirudin dan Zainal, *op. Cit.*, hlm 67.

Ali, 1995:1044

Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rieka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 17.

Ateng Syafrudin, **Perizinan untuk Berbagai Kegiatan**, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012, hlm.1.

Badudu & Zain, 1996:1487

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 114

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.57.

Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.153.

Ibid., hlm. 208

Ibid, Pasal 2

Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni,

Bandung, 1991. hlm 45

Wahab, 1990:45

Refrensi :

Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Wawancara dari Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Wawancara dengan Bapak Handoyo Gesang Selaku Seksi Perizinan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan

Wawancara dengan Bapak Basmi Selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-undang :

Pasal 2 s.d. pasal 7 permenkominfo 02/2008

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Pasal 7 ayat 1 perda nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

Pasal 13 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

Pasal 29 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pasuruan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

Pasal 31 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, menimbang butir a.

Internet :

Sumber : Company Profile PT. Tower Bersama Group.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Base_Transceiver_Station

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

Sumber : pemerintah kabupaten pasuruan mengenai ijin mendirikan menara telekomunikasi

Sumber : tower bersama infrastruktur group